

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

**Rusdiah\*)**  
**STIE YPUP Makassar**

*Abstract : This study aims to determine a) the effect of knowledge of the taxpayer for the small and medium enterprises in the city of Makassar, b.) An understanding of self the assessment on small and medium enterprises in the city of Makassar, c) the level of income of the taxpayer on small and medium enterprises in Makassar , d) the level of convenience in making a payment system of taxation to reporting tax obligations on small and medium enterprises sector in Makassar Tamalate District, analytical methods used are descriptive statistics were used to describe or give a picture of the object studied. The population in this study is small and medium businesses that exist Tamalate District Makassar. The results showed that, a) Knowledge taxpayer affect the reporting of tax obligations on small and medium enterprises sector in Makassar. b) understanding of self-assessment system does not significantly affect the reporting of tax obligations on small and medium enterprises sector in the City Makassar.c) The level of income of the taxpayer does not significantly affect the reporting of tax obligations on the small business sector and menenga in Makassar, .d ) Ease of doing the payment system of taxation significantly affect the reporting of tax obligations on small and medium enterprises sector in Makassar.*

*Keywords, Small and Medium Enterprises, the Self Assessment.*

*Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) pengaruh pengetahuan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah di Kota Makassar, b.) pemahaman sistem self assessmen pada usaha kecil dan menengah di Kota Makassar, c) tingkat penghasilan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah di Kota Makassar, d) tingkat kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar Kecamatan Tamalate, Metode analisa yang digunakan adalah Statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kecil dan menengah yang ada Kecamatan tamalate Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar. b) Pemahaman sistem self assessment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.c) Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menenga di Kota Makassar,.d) Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.*

*Kata Kunci, Pengusaha Kecil dan Menengah, Self Assesment.*

## **PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek

dan obyek pajak, atau dengan kata lain menjangkau wajib pajak baru. dan bahkan Pemerintah melakukan berbagai macam sosialisasi mengenai pajak, seperti pemberian diskon 50% dari tarif pajak badan bagi Usaha Kecil dan Menengah

(UKM). Pemberian fasilitas penurunan tarif diskon 50% juga diberikan dengan batasan atau persyaratan tertentu, *pertama* pihak yang dapat menggunakan fasilitas ini adalah hanya wajib pajak badan dalam negeri, *kedua* wajib pajak badan tersebut memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50 Miliar. Jadi wajib pajak badan yang tidak mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar tetap dikenakan tarif umum.

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah.

Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Salah satu faktor yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan usaha kecil dan menengah, dikarenakan usaha kecil dan menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut pelaporan dari para wajib pajak itu sendiri. Indonesia

menerapkan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Tarjo, 2005:119). Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun pelaporan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Di sisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan pelaporan kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Perpajakan

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena sebagai salah satu penerimaan Negara yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam hal pengertian pajak ini, para ahli telah memberikan suatu batasan, a. Rochmat Soemitra. (2009:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. b. Darma silen (2010:1) menyatakan: Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam melaksanakan pemerintahan

#### 1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi kepada dua fungsi, yaitu fungsi *utility* dan fungsi *regulerend* (Erly Suandi, 2009:14). a. Fungsi *Utility* (Sumber Keuangan Negara) b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

#### 2. Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang menjelaskan hak kepada negara untuk memungut pajak. teori-teori tersebut antara lain (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007:15) adalah: a) Teori asuransi b) Teori kepentingan. c) Teori daya pikul, d) Teori bakti e) Teori asa daya beli

#### 3. Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat (Erly Suandi, 2009:37).

##### a. Berdasarkan Golongan

Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1). Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

##### b. Berdasarkan Wewenang

Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. a) Pajak pusat Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai b) Pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak reklame.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System* (Siti Resmi, 2005:10). a) *Official Assessment System* b) *Self Assesment System* c) *Withholding Assessment System*

### Usaha Kecil dan Menengah

#### 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah :

a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Kriteria

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 per tahun. tidak termasuk [tanah](#) dan bangunan tempat usaha, usaha yang berdiri

sendiri. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008). Jadi usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 per tahun. Industri usaha kecil dan menengah terbagi menjadi dua golongan, yaitu usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria industri usaha kecil dan menengah akan dijelaskan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel. 1  
Kriteria Industri Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Aset (Rp)	Omset (Rp)
1	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
2	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	2,5Miliar-50 Miliar

Sumber: (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2014)

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah yang terus meningkat seiring dengan tingkat kepedulian pemerintah yang cukup besar terhadap Usaha Kecil dan Menengah, membuat Usaha Kecil dan Menengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diharapkan mampu memberikan kondisi positif terhadap perkembangan ekonomi bangsa

Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Di Kota Makassar sendiri perkembangan Usaha Kecil dan Menengah mengalami peningkatan yang sangat besar. Sesuai dengan data dari dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah kota Makassar empat tahun terakhir Usaha Kecil dan Menengah di

Makassar terus mengalami peningkatan sehingga diharapkan juga mampu memperbaiki keadaan ekonomi warga kota. Data Usaha Kecil dan Menengah

di kota Makassar dan Makassar perkembangannya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel .2  
Dekskritip UKM yang ada di kota Makassar

No	Tahun	Jenis usaha	Jumlah usaha	Tenaga kerja	Asset/modal (Rp)	Volume usaha (Rp)
1	< 2009	Kecil Menengah	4.628.688	9.874	88.456.522.050	200.659.294.800
				8.640	78.628.019.600	89.181.908.800
2	2009	Kecil Menengah	4.743.728	10.214	92.879.348.152	204.672.480.696
				8.702	82.559.299.134	90.965.546.976
3	2010	Kecil Menengah	4.938.758	10.365	99.045.348.387	212.859.379.923
				8.764	88.198.287.090	94.604.168.855
4	2011	Kecil Menengah	5.683.875	11.925	105.343.756.673	223.502.348.919
				8.951	93.383.160.073	88.373.772.977
5	2012	Kecil Menengah	6.031.949	12.575	113.343.757.273	242.702.349.415
				9.452	93.317.532.006	102.430.883.100
6	2013	Kecil Menengah	6.656.974	14.461	123.832.808.962	263.087.144.094
				9.944	107.315.161.806	107.795.515.565

Sumber: (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Makassar, 2014)

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Perpajakan Pada Industri Usaha Kecil dan Menengah.

1. Pengetahuan Wajib Pajak  
Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelaporan pelaporan perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat pelaporan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Pengaruh Pemahaman Sistem *Self Assessment*  
Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *selfassessment* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Keuntungan dari sistem *self assessment* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan

oleh fiskus untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak harus memahami mengenai sistem *self assessment*, karena semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai sistem tersebut maka wajib pajak akan lebih mudah memahami dalam mengisi surat pemberitahuan (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2005:101).

3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak  
Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap pelaporan dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
4. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan.  
Pemerintah dan Ditjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai sistem pembayaran pajak

yang lebih efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pada saat ini pemerintah maupun Ditjen Pajak melakukan inovasi terbaru dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk orang kaya dan pembayaran pajak melalui elektronik atau yang lebih dikenal dengan *E-SPT*. Selain itu, Ditjen Pajak juga memberikan kemudahan pembayaran perpajakan kepada usaha kecil dan menengah dengan menerapkan tarif tunggal sebesar 14%.

## Hasil Uji Instrumen Penelitian

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel berikut

Tabel 3.  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
-Pelaporan kewajiban Perajakan	44,95	3,178	182
-Pengetahuan wajib pajak	23,17	1,425	182
- Pemahaman sistem self assessment	39,31	2,209	182
-Penghasilan wajib pajak	17,12	1,560	182
-Pengaruh kemudahan dalam sistem pembayaran pajak	35,97	2,948	182

Sumber: data primer yang diolah

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa pada variabel pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah rata-rata total sebesar 44,95 dan standar deviasi sebesar 3,178. Variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai jawaban, dengan rata-rata total sebesar 23,17 dan standar deviasi sebesar 1,425. Variabel pemahaman sistem *self assessment*, dengan rata-rata total sebesar 39,31 dan standar deviasi sebesar 2,209. Variabel tingkat penghasilan wajib pajak, dengan rata-rata total sebesar 17,12 dan standar deviasi sebesar 1,560. Variabel kemudahan dalam melakukan sistem

pembayaran perpajakan dengan rata-rata total sebesar 35,97 dan standar deviasi sebesar 2,948

### Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk lima variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan

Tabel 4.  
Hasil Uji Reliabilitas  
Variabel Cronbach's

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,684	Reliabel
Pemahaman Sistem <i>SelfAssessment</i>	0751	Reliabel
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	0,664	Reliabel
Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan	0,788	Reliabel
Pelaporan Kewajiban Perpajakan	0,765	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,684, pemahaman sistem *self assessment* sebesar 0,751, tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,664, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran 0,788, dan pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah yaitu sebesar 0,765.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 5 di bawah ini menjelaskan mengenai hasil uji multikolonieritas, dimana tidak terdapat problem multiko pada model persamaan regresi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,600	6,267		4,244	,000		
	Pengetahuan wajib pajak	-,684	,195	-,388	-3,513	,001	,640	1,562
	Pemahaman sistem self assessment	,273	,115	,266	2,375	,021	,623	1,606
	Tingkat penghasilan wajib pajak	-,142	,150	-,086	-,945	,349	,946	1,057
	Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak	,711	,099	,646	7,160	,000	,959	1,043

a. Dependent Variable: Pelaporan kewajiban perpajakan pada UKM

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* 0,640; 0,623; 0,946; 0,959, serta VIF sebesar 1,562 untuk variabel pengetahuan wajib pajak; 1,606 untuk variabel pemahaman sistem *selfassessment*; 1,606 untuk variabel tingkat penghasilan wajib pajak ;1,057 dan untuk variabel kemudahan dalam

melakukan sistem pembayaran 1,043

### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda, yaitu:

#### a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai besarnya nilai persentase keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

Tabel 6  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781(a)	,610	,579	2,141

a Predictors: (Constant), Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak, Tingkat penghasilan wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemahaman sistem self asesment

Sumber: data primer yang diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,781 atau 78,1%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,579 atau 57,9% menunjukkan bahwa variabel pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan tingkat kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan sebesar 57,9%, sedangkan sisanya sebesar 52,1%

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji t Statistik

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini, jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$ , sedangkan jika nilai *probability* t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ .

Tabel 7  
Hasil Uji t Statistik  
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	26,600	6,267		4,244	,000
	Pengetahuan wajib pajak	-,684	,195	-,388	-3,513	,001
	Pemahaman sistem self asesment	,273	,115	,266	2,375	,021
	Tingkat penghasilan wajib pajak	-,142	,150	-,086	-,945	,349
	Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak	,711	,099	,646	7,160	,000

a Dependent Variable: Pelaporan kewajiban perpajakan

Sumber: data primer yang diolah

### Hasil Uji Hipotesis 1:

**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.**

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 7 diatas, variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti menerima  $H_{a1}$ , sehingga variabel

pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengetahuan wajib pajak lebih kecil dari 0,05.

#### Hasil Uji Hipotesis 2:

##### **Pengaruh Pemahaman Sistem *Self Assessment* Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.**

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 7 diatas, variabel pemahaman sistem *self assessment* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,021. Hal ini berarti menolak  $H_{a2}$ , sehingga variabel pemahaman sistem *selfassessment* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemahaman sistem *selfassessment* lebih besar dari 0,05.

#### Hasil Uji Hipotesis 3:

##### **Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.**

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 7 diatas, variabel tingkat penghasilan wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,349. Hal ini berarti menolak  $H_{a3}$ , sehingga variabel tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan

menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tingkat penghasilan wajib pajak lebih besar dari 0,05.

#### Hasil Uji Hipotesis 4:

##### **Pengaruh Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.**

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 7 diatas, variabel pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti menerima  $H_{a4}$ , sehingga variabel pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tingkat penghasilan wajib pajak lebih kecil dari 0,05.

#### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel dibawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$ , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ .

Tabel 8  
Hasil Uji Simultan  
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	358,633	4	89,658	19,566	,000(a)
	Residual	229,113	50	4,582		
	Total	587,745	54			

a Predictors: (Constant), Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak, Tingkat penghasilan wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Pemahaman sistem self assessment

b Dependent Variable: Pelaporan kewajiban perpajakan pada UKM

Sumber: data primer yang diolah

### Pembahasan

- 1) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat pelaporan kewajiban perpajakan, sedangkan semakin rendah pengetahuan wajib pajak maka semakin rendah tingkat pelaporan kewajiban perpajakannya.
- 2) Pengaruh Pemahaman Sistem *Self Assessment* Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pemahaman sistem *self assessment* sebesar 0,021, lebih besar dari 0,05, sehingga pemahaman sistem *self assessment* tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat disebabkan karena, walaupun wajib pajak paham tentang sistem *self assessment* belum tentu berpengaruh terhadap tingkat pelaporan kewajiban perpajakan, dikarenakan semakin paham seseorang tentang sistem *self assessment* akan berusaha untuk membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutanganya.
- 3) Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 8 diatas

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,349, lebih besar dari 0,05, sehingga tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak belum tentu tingkat pelaporan dalam membayar pajak semakin tinggi, dikarenakan semakin tinggi penghasilan seseorang tentu saja semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayar.

- 4) Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan sebesar 0,000, lebih besar dari 0,05, sehingga kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Hubungan antara pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan dengan pelaporan dalam membayar pajak adalah positif. Dikarenakan semakin mudah sistem pembayaran perpajakan, maka semakin tinggi tingkat pelaporan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.
2. Pemahaman sistem *self* assessment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.
3. Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.
4. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.

### DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, artikel diakses tanggal 15 Februari.
- Darma Silen. Pengantar perpajakan, Salemba, Jakarta, 2010
- Dinas Pelayanan Pajak. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, artikel diakses tanggal 04 Februari 2014, [http : // dipenda . jakarta . goId / modules / perundangan / item . php? itemid](http://dipenda.jakarta.goId/modules/perundangan/item.php?itemid)
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, Makassar, 2014
- Erly Suandi. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Imam Ghozali. Aplikasi Multivariate Program SPSS, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Mardiasmo. Akuntansi Perpajakan, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Maria Ulfa. Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan, Jakarta. 2011
- Rochmat Soemitro, Konsep Dasar Pajak”, Surakarta, 2009
- Siti Resmi. Perpajakan, Buku 1 Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Siti Qomaria. Pengaruh Tingkat Pemahaman Sistem Self Assesment Pada Wajib Pajak”, Bandung, 2009
- Tarjo. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Pelaporan Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntatnsi dan Kepatuhan Wajib Pajak, Surabaya, 2003
- Tarjo dan Indra Kusumawati. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sistem, Riau, 2005
- Waluyo dan Ilyas. Perpajakan, Jakarta, 2002
- Wirawan dan Richard, Teori Perpajakan, Jogjakarta, 2007